



# LAKIP

## Laporan Akuntabilitas Kinerja

## Instansi Pemerintah 2019

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  
dan Pelabuhan Bebas Batam





# **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019**

**Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan  
Pelabuhan Bebas Batam**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau disebut juga Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), yang juga merupakan perjalanan tahun ke-lima dari Renstra Tahun 2015-2019.

Penyusunan LAKIP ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2013 tentang Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran; serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

LAKIP Tahun 2019 Badan Pengusahaan Batam juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

LAKIP ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2019 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2019, sekaligus laporan kinerja Badan Pengusahaan Batam yang merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

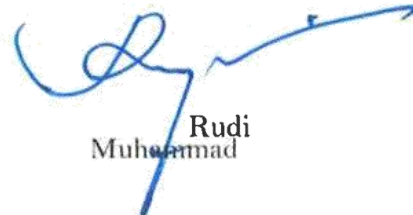
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam tahun 2019 dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam dalam periode tahun 2019.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP tahun 2019 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Pengusahaan Batam di masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan LAKIP tahun 2019 ini masih ada beberapa kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh *stakeholders* dan komponen yang ada di Badan Pengusahaan Batam.

2020

Batam, **28 Februari**  
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  
Bebas Batam



Rudi  
Muhammad

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2019 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah direncanakan.

Capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.

Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Beberapa capaian utama kinerja Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2019 adalah sebagai berikut;

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BP Batam				
Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara	1	Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang professional	1	Meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global.	1.1	Pertumbuhan Ekonomi	1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan
					1.2	Transformasi dari Free Trade Zone ke Kawasan Ekonomi Khusus	1.2.1	Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan
					1.3	Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang signifikan	1.3.1	Realisasi jumlah PNPB tahun 2019
	2	Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2	Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK).	2.1	Investasi pada kawasan perusahaan	2.1.1	Realisasi nilai investasi
					2.2	Pengembangan Sistem Informasi BLU	2.2.1	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU
	3.	Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	3.	Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	3.1	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	3.1.1	Opini Laporan Keuangan
					3.2	Utilisasi aset yang dikelola oleh BP Batam	3.2.1	Peningkatan realisasi utilisasi asset
					3.3	Pengelolaan BP Batam yang akuntabel	3.3.1	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal
			4.	Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4.1	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	4.1.1	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
					4.2	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	4.2.1	Pencapaian kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan publik

Tabel Keterkaitan Visi – Misi – Realisasi 2019

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sasaran 10 indikator kinerja utama, dengan capaian sasaran sebesar **82.68 %**. Adapun pada IKU Realisasi nilai investasi pada tahun 2019 yang diperoleh sejumlah 461,044,862 (US\$), seiring dengan diterapkannya OSS (*Online Single Submission*), maka nilai investasi hingga desember 2019 menggunakan mata uang Rupiah sebesar Rp 6,685,150,499,000 dan tidak dapat dipisahkan antara komitmen dan realisasi investasi. Sasaran strategis Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel dengan indikator kinerjanya Opini Laporan Keuangan BP Batam untuk memperoleh predikat WTP pada laporan keuangan belum bisa dilakukan pengukuran karena hasil Audit atas Laporan Keuangan BP Batam TA 2019 belum dilakukan sehingga mempengaruhi persentase realisasi kinerja atas target sasaran strategis.

Kategori pencapaian sasaran tahun 2019 cukup sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kendala yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran, antara lain;

- a. Hambatan eksternal yang dominan dan sangat mempengaruhi capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan, misalnya;
  1. Kurangnya sinkronisasi dalam penerapan aturan perijinan untuk KPBPB Batam.
  2. Masih kurang optimalnya koordinasi antarlembaga.
- b. Hambatan internal yang cukup mempengaruhi capaian kinerja adalah;
  1. Sebaran sumber daya manusia yang belum optimal.
  2. Penanganan pengaduan yang belum optimal.

Berbagai permasalahan atau kendala tersebut di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi agar tidak menghambat pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan;

- a. Penyelesaian peraturan dan ketentuan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas BP Batam;
- b. Tata kelola kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam sebaran yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- c. Perlu adanya komitmen untuk pengelolaan pengaduan hingga tuntas.
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset dan sarana lainnya agar dapat memperoleh sumber pendapatan baru;
- e. Perlunya inovasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP Batam.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan guna pencapaian sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik mungkin saja belum semua dapat diterapkan pada LAKIP ini. Namun demikian, kami terus berupaya agar laporan ini dapat memenuhi tujuan penyusunannya.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam.....	2
C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam .....	5
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
E. Struktur Organisasi.....	8
F. Organisasi Pembina dan Asistensi.....	8
G. Unit Usaha dan Kegiatan Utama .....	10
H. Sumber Daya Manusia .....	13
I. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh.....	14
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Rencana Strategis .....	15
A.1. Visi.....	16
A.2. Misi.....	17
A.3. Tujuan .....	19
A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	19
A.5. Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
A.6. Program .....	24
A.7. Rencana Kinerja.....	25
B. Perjanjian Kinerja .....	29
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama .....	30
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	30
C. Akuntabilitas Keuangan .....	36
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam.....	8
Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran 2019.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Analisis SWOT .....	14
Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam .....	20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Srategis .....	21
Tabel 2.3. Keterkaitan Visi – Misi – Realisasi BP Batam .....	23
Tabel 2.4. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU .....	28
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	29
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Ke-1 .....	31
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2 .....	31
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran ke-3 .....	32
Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4.....	32
Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran Ke-5 .....	33
Tabel 3.6. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6 .....	33
Tabel 3.7. Indikator Kinerja Sasaran Ke-7 .....	34
Tabel 3.8. Indikator Kinerja Sasaran Ke-8 .....	34
Tabel 3.9. Indikator Kinerja Sasaran Ke-9 .....	35
Tabel 3.10. Indikator Kinerja Sasaran Ke-10.....	35
Tabel 3.11. Capaian IKU 2019.....	37
Tabel 3.12. Realisasi PNBPN 2019.....	37
Tabel 3.13. Realisasi PNBPN 2018.....	38
Tabel 3.1.4. Perbandingan target dan realisasi PNBPN 2018 – 2019.....	39
Tabel 3.14. Perbandingan DIPA 2019 dan 2020 .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pulau Batam merupakan salah satu pulau di antara 329 pulau dalam gugusan Kepulauan Riau, yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura. Langkanya catatan tertulis dari pulau ini, maka hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada tahun 1970-an, Pulau Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau disingkat dengan Otorita Batam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 tersebut ditandatangani atau diberlakukan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Pulau Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha, khususnya penanaman modal asing dari berbagai negara, yang mampu menampung tenaga kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin tumbuhnya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari

masalah. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

## **B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan institusi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program organisasi agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kinerja organisasi, serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu strategis juga merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka Badan Pengusahaan Batam akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Untuk mendukung instrumen kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berdaya saing untuk meningkatkan nilai investasi adalah pengaturan dalam pelayanan, khususnya yang di bawah naungan pengelolaan BP Batam.

Beberapa aspirasi dari masyarakat (*stakeholder*) yang dianggap mampu menjadi daya ungkit Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu;

1. Pelayanan perijinan terpadu dalam satu tempat bernama Mall Pelayanan Publik sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan akurat;
2. Penerapan OSS (*Online Single Submission*) bagi kemudahan dalam investasi di KPBPB Batam.

3. BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diharapkan segera mengoptimalkan fungsi kepelabuhanan untuk pemanfaatan kapasitas yang tersedia;
4. Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung iklim investasi dan daya dukung kehidupan masyarakat;
5. Profesionalisme pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*stakeholder*) yang berlandaskan atas prinsip efektif, efisien dan transparan.

Sedangkan beberapa isu strategis Badan Pengusahaan Batam yang perlu diatasi dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, antara lain;

- 1) Peraturan Perundangan UU 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang belum dilengkapi dengan peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam peraturan teknis antara lain adalah masalah pelimpahan wewenang perizinan, pembiayaan pembangunan, pembagian pendapatan, pertanahan, dll. Salah satu pelayanan yang diinginkan oleh calon investor dari pengelola kawasan adalah kemudahan dalam memperoleh berbagai izin yang disyaratkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang umumnya dalam bentuk pelayanan satu atap di dalam Mall Pelayanan Publik. Lama pengurusan dan biaya, serta prosedur permintaan izin-izin harus ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Pengembangan dan pengoperasian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga akan menyangkut kepentingan dan urusan tingkat daerah, seperti masalah tata ruang, penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana, dll. Untuk itu perlu dibuat peraturan Kepala BP Batam yang mengatur kerjasama kedua lembaga.

- 2) Pengembangan infrastruktur. Untuk menunjang kegiatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka infrastruktur harus dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur juga melingkupi pengembangan sistem dan prosedur yang memberi kemudahan bagi investor menjalankan usahanya, seperti sistem kepabeanan, sistem keimigrasian,

sistem kepelabuhanan, sistem penerbangan, sistem perbankan, dll. Pembangunan infrastruktur dapat dibiayai oleh swasta, pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

- 3) Insentif. Insentif yang menarik diperlukan untuk mendatangkan investor. Adanya investasi asing diharapkan akan membuka lapangan kerja, meningkatkan penguasaan teknologi dan manajemen usaha, mendorong tumbuhnya industri pendukung, dan mendatangkan devisa dari kegiatan ekspor yang dilakukan.
- 4) Tata kelola. Untuk dapat bersaing dengan FTZ lain maka pengelolaan perlu dilakukan secara profesional dengan praktek manajemen standar internasional. Dalam kaitan ini, Badan Pengusahaan Batam dapat membangun suatu pola kerjasama yang sifatnya mutualistik dengan kawasan sejenis di ASEAN. Selain itu, perlu secara seksama memanfaatkan kerjasama ekonomi sub-regional yang telah dikembangkan selama ini, khususnya dalam konteks IMS-GT dan IMT-GT, dengan membuka kerjasama dan hubungan bisnis yang intensif dengan kawasan sejenis di berbagai negara.
- 5) Ketenagakerjaan. Investor yang beroperasi di Batam akan memerlukan tenaga terampil dalam jumlah banyak. Apalagi seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal 2016, yang memungkinkan tenaga kerja asing mengisi posisi pada bidang-bidang tertentu, maka hal ini perlu diantisipasi. Pada saat ini tenaga terampil tersebut masih belum mencukupi. Untuk itu agar kekurangan tenaga terampil itu tidak diisi oleh pendatang dari luar Batam atau luar negeri, maka sejak dini generasi muda di Kawasan Batam perlu disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga terampil yang siap dipekerjakan. Pengusaha lokal juga perlu disiapkan untuk dapat menjadi penyalur bahan pangan dan industri bagi perusahaan industri pengolahan dari luar yang akan menjalankan usahanya di Kawasan Batam.
- 6) Kelembagaan. Perlu dilakukan pengaturan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, BP Batam dengan Pemko Batam agar pembangunan Kawasan Batam tidak mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain masalah pertanahan, perizinan, pengelolaan, pembiayaan, tata ruang dan lingkungan, dll. Pola hubungan kerjasama antara Pemko Batam dengan BP Batam juga perlu dikaji secara mendalam, sehingga dapat terjadi suatu pola kemitraan yang sinergis antar kedua lembaga. Kejelasan terhadap kewenangan, khususnya antara kewenangan Pusat yang diemban oleh BP Batam dan kewenangan Pemko Batam, perlu ditetapkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dan pengusahaan kawasan Batam di masa mendatang.

### C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun.

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Wilayah kerja KPBPB ditambah dengan Pulau Janda Berhias dan gugusannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan utama pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Penetapan Batam sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2007 dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007, maka kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi ***Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*** atau disingkat dengan ***Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)***.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dijalankan oleh BP Batam, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan/peraturan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 20 Agustus 2007;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 Pemberhentian Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Sekretariat, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Organisasi, Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta Perwakilan;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Teknik, Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan, dan Pengembangan Manajemen Kinerja;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengusahaan Sarana Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Rumah Sakit, dan Pengelolaan Lahan;

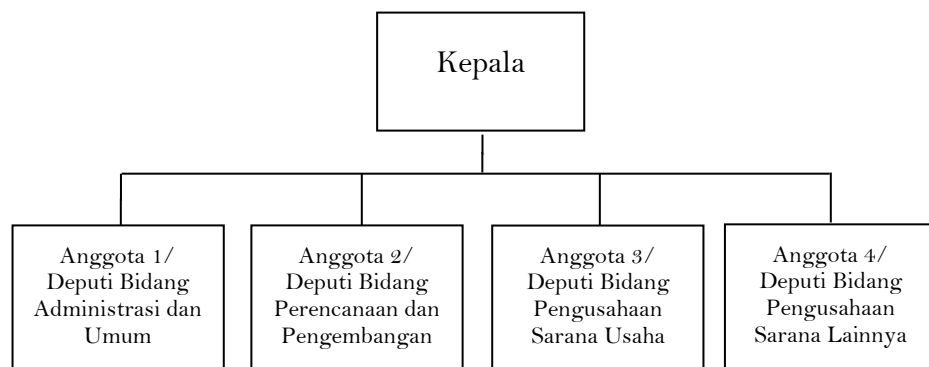
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana, Pemanfaatan Aset, serta Pengelolaan Air dan Limbah; dan
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lalu Lintas Barang, Promosi dan Hubungan Masyarakat, serta Pengamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan;

- a. Membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- b. Mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Membuat peraturan di bidang tata tertib pelayanan dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain meliputi;
  - 1) Pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga mampu bersaing dengan Kawasan sejenis di negara lain.
  - 2) Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor industri, maritim, perdagangan, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya;
  - 3) Memproses Perizinan Usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam dan melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam.
- e. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk tugas-tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam, kecuali terhadap tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## E. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dewan Kawasan menetapkan organisasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai berikut;



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam dibantu oleh 4 anggota atau deputi yang mempunyai tugas sesuai bidangnya, yaitu;

1. Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan
2. Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan
3. Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha
4. Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya

Sedangkan sebagai penjabaran dari peraturan dewan kawasan dimaksud Kepala Badan Pengusahaan Batam mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

## F. Organisasi Pembina dan Asistensi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 29 Februari 2016, penetapan

kebijakan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Badan Pengusahaan Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya terdiri dari;

- Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Menteri Perdagangan;
  5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. Sekretaris Kabinet;
  9. Gubernur Kepulauan Riau;
  10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  11. Walikota Batam.

Pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam tidak lepas dari peran Dewan Kawasan yang memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan kepada BP Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam;
- c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Badan Pengusahaan Batam mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kawasan (DK) dapat membentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis. DK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DK bertugas selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

## G. Unit Usaha dan Kegiatan Utama

Jumlah unit kerja sesuai struktur organisasi BP Batam adalah sebanyak 22 unit, terdiri dari;

- a. Unit kerja yang menghasilkan PNBP dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung sebanyak 12 unit kerja, yaitu sebagai berikut;
  1. Kantor Pelabuhan Laut, memiliki 5 jenis layanan yaitu;
    - 1) Pelayanan Keluar Masuk Kapal;
    - 2) Pelayanan Barang;
    - 3) Pelayanan Penumpang yang terdiri dari pas penumpang di terminal penumpang;
    - 4) Pelayanan Jasa Alat;
    - 5) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya.
  2. Kantor Pengelolaan Lahan, memiliki 8 jenis layanan meliputi;
    - 1) Pelayanan Ijin Alokasi Lahan;
    - 2) Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lahan;
    - 3) Pelayanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL);
    - 4) Pelayanan Legalisasi Dokumen Lahan;
    - 5) Pelayanan Pecah dan Penggabungan Penetapan Lokasi;
    - 6) Pelayanan Ijin Peralihan Hak;
    - 7) Pelayanan Penggantian Dokumen;
    - 8) Pelayanan Perpanjangan UWTO.
  3. BUBU Hang Nadim, memiliki 8 jenis layanan meliputi;
    - 1) Pelayanan jasa penerbangan;
    - 2) Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara;
    - 3) Pelayanan jasa penumpang pesawat udara;
    - 4) Pelayanan jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*);
    - 5) Pelayanan jasa pemakaian konter pelaporan (*check in counter*);
    - 6) Pelayanan jasa penumpukan barang dalam gudang lini 1;
    - 7) Pelayanan jasa penggunaan Bandar Udara di luar jam operasi;
    - 8) Pelayanan jasa sewa dan tanda masuk kawasan terbatas bandar udara (pas);
  4. Rumah Sakit BP Batam, yang terbagi dalam 21 jenis layanan meliputi;
    - 1) Pelayanan gawat darurat;
    - 2) Pelayanan rawat jalan;
    - 3) Pelayanan rawat inap;

- 4) Pelayanan bedah sentral;
  - 5) Pelayanan persalinan dan perinatology;
  - 6) Pelayanan intensif (PI);
  - 7) Pelayanan radiologi;
  - 8) Pelayanan laboratorium;
  - 9) Pelayanan rehabilitasi medik;
  - 10) Pelayanan farmasi;
  - 11) Pelayanan pencegahan pengendalian infeksi;
  - 12) Pelayanan gakin;
  - 13) Pelayanan ambulance/kereta jenazah;
  - 14) Pelayanan pemulasaran jenazah;
  - 15) Pelayanan gizi;
  - 16) Pelayanan transfuse darah;
  - 17) Pelayanan rekam medik;
  - 18) pelayanan pengelolaan limbah;
  - 19) Pelayanan administrasi dan manajemen;
  - 20) Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
  - 21) Pelayanan laundry.
5. Kantor Air dan Limbah, memiliki 7 jenis layanan meliputi;
- 1) Pelayanan rekomendasi sambungan air bersih;
  - 2) Pelayanan jasa pengurusan septic tank (sumur tinja);
  - 3) Pelayanan jasa pengolahan limbah domestik;
  - 4) Pelayanan izin pengelola pembuangan limbah ke IPAL domestik;
  - 5) Pelayanan izin jasa rekanan (Tanda Daftar Rekanan) Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil;
  - 6) Pelayanan sewa gudang limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
  - 7) Pelayanan sewa lahan KPLI - B3 Kabil.
6. Direktorat Pemanfaatan Aset, memiliki 9 jenis layanan meliputi;
- 1) Pelayanan penyediaan bibit pohon penghijauan;
  - 2) Pelayanan jasa persetujuan izin pematangan lahan;
  - 3) Pelayanan izin pemangkasan pohon penghijauan dan izin penggalian lokasi taman dan land clearing;
  - 4) Pelayanan jasa mini garden dan dekorasi;
  - 5) Pelayanan izin penggunaan sementara bagian ROW /buffer;
  - 6) Pelayanan sewa kamar rumah susun;

- 7) Pelayanan pemanfaatan kandang dan tapak kandang sapi dan kambing;
  - 8) Pelayanan jasa pemotongan sapi dan kambing;
  - 9) Pelayanan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan.
  7. Biro Keuangan, memiliki satu jenis layanan yaitu administrasi keuangan.
  8. Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi, memiliki 2 jenis layanan yaitu;
    - 1) Data Center;
    - 2) Training Center.
  9. Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana, memiliki 2 jenis layanan meliputi;
    - 1) Pelayanan izin penempatan reklame;
    - 2) Laboratorium uji tanah.
  10. Kantor Perwakilan Jakarta, memiliki layanan penginapan yaitu kuningan guest house.
  11. Direktorat Lalu Lintas Barang, memiliki 7 jenis layanan meliputi :
    - 1) Pelayanan izin usaha (registrasi usaha);
    - 2) Pelayanan penetapan sebagai importir terdaftar produk tertentu;
    - 3) Pelayanan izin pemasukan barang dan barang modal bukan baru;
    - 4) Pelayanan penetapan sebagai importir terdaftar minuman beralkohol;
    - 5) Pelayanan penetapan sebagai importir terdaftar kendaraan bermotor;
    - 6) Pelayanan penetapan sebagai importir terdaftar alat pertanian;
    - 7) Pelayanan penetapan sebagai importir produsen plastik.
  12. Biro Perencanaan Teknik, memiliki satu jenis layanan yaitu pelayanan jasa persetujuan izin fatwa planologi.
- b. Unit kerja yang tidak menghasilkan PNBSP, namun memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 1 unit kerja, dengan rincian sebagai berikut;
1. Direktorat PTSP, kedua unit kerja tersebut memiliki 12 jenis layanan meliputi :
    - 1) Pelayanan pendaftaran penanaman modal;
    - 2) Pelayanan izin pembukaan kantor cabang;
    - 3) Pelayanan pendaftaran perluasan penanaman modal;
    - 4) Pelayanan pendaftaran alih status penanaman modal;
    - 5) Pelayanan perubahan izin usaha penanaman modal;
    - 6) Pelayanan perubahan ketentuan penanaman modal;
    - 7) Pelayanan izin usaha penanaman modal;
    - 8) Pelayanan izin usaha perluasan penanaman modal;
    - 9) Pelayanan izin usaha penggabungan penanaman modal (merger);
    - 10) Pelayanan pembatalan pendaftaran / persetujuan penanaman modal;

- 11) Pelayanan pencabutan izin usaha penanaman modal;
  - 12) Pelayanan penerbitan angka pengenal importir.
- c. Unit Kerja Layanan Pendukung yang memberikan layanan internal BP Batam sebanyak 9 unit kerja, dengan rincian sebagai berikut;
1. Biro Umum dan Sekretariat, memiliki 3 jenis layanan terdiri dari;
    - 1) Pelayanan kerumahtanggaan internal BP Batam;
    - 2) Pelayanan keprotokolan dan pimpinan BP Batam;
    - 3) Pelayanan pengadaan barang/jasa.
  2. Biro Sumber Daya Manusia, memiliki satu jenis layanan yaitu layanan kepegawaian BP Batam;
  3. Biro Hukum dan Organisasi, memiliki satu jenis layanan yaitu layanan bantuan hukum;
  4. Biro Perencanaan Program dan Litbang, memiliki satu jenis layanan yaitu layanan rencana program kerja anggaran dan revisi anggaran;
  5. Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan, memiliki layanan pengembangan usaha dan pentarifan;
  6. Biro Pengembangan Manajemen Kinerja, memiliki satu jenis layanan yaitu pengembangan kinerja SDM BP Batam;
  7. Direktorat Promosi dan Humas, memiliki layanan promosi dan kehumasan BP Batam;
  8. Direktorat Pengamanan, memiliki layanan pemadam kebakaran dan pengamanan aset investasi;
  9. Satuan Pemeriksa Internal, memiliki layanan audit internal BP Batam.

## H. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan BP Batam sebanyak 2,738 karyawan dengan rincian sebagai berikut;

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| a. PNS DPB  | : 1612 karyawan |
| b. PNS DPK  | : 71 karyawan   |
| c. PNS TGS  | : 2 karyawan    |
| d. POLRI    | : 2 karyawan    |
| e. CPNS DPB | : 1 karyawan    |
| f. NON      | : 587 karyawan  |
| g. P2K      | : 447 karyawan  |
| h. SK       | : 16 karyawan   |



## I. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh

### Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*)

<b>Internal</b>	<b>Kekuatan (Strengths)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem perijinan Online Single Submission (OSS);</li> <li>2. Ketersediaan SDM yang handal;</li> <li>3. Lokasi geografis yang strategis berada di selat malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran/perdagangan tersibuk di dunia;</li> <li>4. Badan Pengusahaan Batam diberikan hak pengelolaan lahan di Batam untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan;</li> <li>5. Pelayanan kepada publik dan calon investor yang terintegrasi yang melayani perijinan dalam mall pelayanan publik; pelayanan investasi diberikan kemudahan dengan i23j dan KILK;</li> <li>6. Adanya peningkatan tata kelola aparatur SDM di BP Batam diataranya dengan sistem rekrutmen CAT dan pola insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>7. Hubungan ekonomi regional yang saling mengisi;</li> <li>8. Terjalannya hubungan yang kuat dengan Singapura.</li> </ol>	<b>Kelemahan (Weakness)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Penempatan SDM dengan kompetensi sesuai bidang;</li> <li>2. Pelimpahan peran/wewenang yang dirasa masih diperlukan;</li> <li>3. Masih rendahnya penegakkan hukum terutama dalam mengatasi permasalahan pertanahan;</li> <li>4. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam;</li> <li>5. Belum terpadu dan terintegrasinya kegiatan promosi investasi antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam;</li> <li>6. Masih kurangnya kebijakan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan untuk mendukung peningkatan ketenagakerjaan;</li> <li>7. Pengaruh ego sektoral antarlingkungan intansi terkait di Batam pada skala lokal dan regional;</li> </ol>
<b>Eksternal</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perang dagang China-Amerika, mengakibatkan Batam menjadi alternatif relokasi dan distribusi produk.</li> <li>2. Letak Pulau Batam sangat strategis di salah satu jalur pelayaran internasional paling ramai dan dapat diakses dengan mudah;</li> <li>3. Keuntungan berinvestasi di Batam terletak pada biaya investasi, harga sewa lahan, tenaga kerja, peralatan dan biaya operasional yang kompetitif;</li> <li>4. Tersedianya sarana perhubungan darat, laut dan udara dengan standar internasional untuk memenuhi kebutuhan investasi termasuk tersedianya sarana air bersih dan listrik;</li> <li>5. Komitmen Pemerintah Pusat yang kuat untuk mendukung pengembangan investasi di Indonesia;</li> <li>6. Indonesia telah menjadi lokasi investasi yang menarik;</li> <li>7. Pertumbuhan ASEAN sebagai blok ekonomi yang penting;</li> <li>8. Potensi Indonesia sebagai pusat pelayaran yang penting;</li> <li>9. Relokasi perusahaan multinasional di beberapa negara akibat globalisasi;</li> <li>10. Munculnya sektor ekonomi baru seperi industri hijau dan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>	<b>Ancaman (Threats)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pengembangan kawasan baru yang sejenis di beberapa negara Asia, seperti Malaysia, Vietnam, Philipina, Cina dan India;</li> <li>2. Berkembangnya dinamika ekonomi Singapura;</li> <li>3. Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asian) dimana seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa dilakukan secara bebas oleh seluruh anggota negara ASEAN;</li> <li>4. Halangan perdagangan yang menahan perkembangan ekonomi.</li> </ol>

Tabel 1.1. Analisis SWOT

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Memperhatikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam periode sebelumnya, dan dimulainya acuan baru kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan (BP) Batam Tahun 2019, maka telah ditetapkan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan sasaran strategis BP Batam. Sepuluh IKU tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan;
2. Realisasi nilai investasi;
3. Opini Laporan Keuangan;
4. Realisasi jumlah PNBPN tahun 2019;
5. Pencapaian kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan publik;
6. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU;
7. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK ;
8. Peningkatan realisasi utilisasi aset;
9. Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal;
10. Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan.

Penetapan IKU tersebut telah memenuhi kriteria minimum sebagai indikator kinerja yang baik, antara lain;

1. Spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/ *outcomes*);
2. Keterukuran (*measurability*) dan keterkaitan (*relevance*) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
3. Spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/ *outcomes*);
4. Indikator yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*) oleh organisasi;
5. Menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*timebound*).

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan tahun ke-lima dari Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam 2015—2019. Renstra yang disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, merupakan dasar dari perencanaan dan harus diimplementasikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam. Penyusunan Renstra pun telah mengikuti pola, berupa tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

### **A.1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi pemerintah, dalam hal ini BP Batam.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010—2014, serta memperhatikan hasil analisis isu strategis dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka visi pembangunan BP Batam tahun 2015—2019 seperti yang tertulis di dalam Renstra BP Batam 2015-2019 adalah;

#### **“Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara”**

Berdasarkan visi diatas maka beberapa elemen utama yang tergabung dalam visi BP Batam, antara lain;

- a. Sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam hal ini BP Batam memiliki komitmen untuk merealisasikan Pulau Batam dalam lingkup pengelolaannya sebagai kawasan yang mampu bersaing dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara;
- b. Elemen kawasan investasi yang berdaya saing mengandung makna suatu kawasan yang menarik bagi kegiatan investasi yang didukung dan difasilitasi oleh:
  - 1) lokasi yang strategis;
  - 2) kemudahan perizinan, baik barang maupun jasa;
  - 3) sarana prasarana yang berstandar internasional;
  - 4) birokrasi yang mudah;
  - 5) pemberian insentif yang tunduk mengikuti aturan yang dikeluarkan organisasi perdagangan internasional (WTO);
  - 6) mendorong pembentukan usaha kepemilikan pribadi, dan
  - 7) peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- c. Asia Tenggara, merupakan batasan kawasan regional yang ingin dituju sebagai kawasan yang mempunyai kemampuan bersaing dalam mewujudkan tempat usaha

yang menguntungkan dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di antara kawasan sejenis di Asia Tenggara.

Dalam rangka menjadi pengelola kawasan yang mampu bersaing, diharapkan mampu pula menarik minat industrialis asing, *trader* dan *bankir* asing, serta pengelola usaha lainnya menempatkan kegiatan usahanya di Batam, yang ditandai tidak hanya dengan kenaikan pertumbuhan nilai realisasi investasi, namun berkembang pula menjadi pusat industri inti yang maju dengan pusat-pusat industri yang terkonsentrasi.

#### **A.2. Misi**

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan misi BP Batam, sebagai berikut;

- 1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;**
- 2. Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);**
- 3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.**

Penjelasan Misi;

1. *Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional*; misi ini merupakan langkah utama BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dalam upaya meningkatkan pengaturan pengelolaan tugas pokok dan fungsinya melalui cara peningkatan pembangunan sumberdaya manusia yang produktif, kompetitif, profesional yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas dan berorientasi pada konsesi bersama secara adil, efektif, efisien, akuntabel, serta tunduk dan taat dalam penegakkan supermasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan tata kelola pengelolaan yang baik dan mendukung reformasi birokrasi.
2. *Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)*; misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai melalui perwujudan kawasan investasi yang berlandaskan pada etika bisnis dan berkelanjutan yang didukung oleh sarana dan prasarana, baik fisik maupun nonfisik berstandar internasional, serta keunggulan teknologi informatika dan komunikasi yang handal dengan fokus utama pada peningkatan nilai investasi.

3. *Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan*; misi ini merupakan upaya dalam memfasilitasi kawasan-kawasan investasi yang dikembangkan dengan berwawasan lingkungan, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai, serta kualitas yang berstandar internasional dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan pengembangan dan pengelolaan investasi. Pengembangan kawasan Batam dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Badan Pengusahaan Batam, dalam Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 161 Tahun 2015, menetapkan nilai-nilai Budaya Kerja, yang disingkat dengan SPIRIT, sebagai berikut;

1. *Service Excellence*.

Dalam *Service Excellence* terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

2. *Professional*.

Dalam *Professional* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3. *Innovative*.

Dalam *Innovative* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam menggunakan dengan optimal semua sumber daya yang ada dengan kreatifitas tinggi untuk menghasilkan perbaikan dan perubahan positif yang berkelanjutan ke arah kemajuan.

4. *Integrity*.

Dalam *Integrity* terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata dan berperilaku dan bertindak, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan baik dan benar, konsisten serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

#### 5. Entrepreneurship.

Dalam *Entrepreneurship* terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam memiliki jiwa dan perilaku menciptakan peluang usaha dengan mempertimbangkan risiko.

### **A.3. Tujuan**

Berdasarkan pada faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), selanjutnya untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam ditetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pencapaian dimaksud.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global;
2. Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
3. Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional;
4. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Melalui tujuan di atas maka diharapkan akan menarik dan mengembangkan investasi dalam sektor industri, perdagangan, alih kapal (*transshipment*) dan pariwisata, juga dapat lebih mengembangkan, serta membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

### **A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan lima tahun ke depan maka sasaran strategis Badan Pengusahaan Batam telah ditetapkan dalam tiap tahun anggaran dan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu juga menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui rangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Badan Pengusahaan Batam dalam menetapkan sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan keseluruhan

satuan kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis. Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama halnya seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Sasaran Badan Pengusahaan Batam tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan;
2. Komitmen nilai investasi;
3. Opini Laporan Keuangan;
4. Tingkat Pertumbuhan PNBPN;
5. Pencapaian Kepuasan *Stakeholder* terhadap Pelayanan Publik;
6. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU;
7. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
8. Peningkatan Realisasi Utilisasi Aset;
9. Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal;
10. Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 KEK ke Dewan Kawasan.

Berikut adalah tabel keterkaitan antara sasaran dan indikator kinerja;

Sasaran	Indikator Kinerja
1.1. Pertumbuhan Ekonomi	1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan
1.2. Investasi PMA pada Kawasan perusahaan	1.2.1. Komitmen nilai investasi
1.3. Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	1.3.1. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam
1.4. Pertumbuhan Pendapatan Layanan secara Signifikan	1.4.1. Tingkat Pertumbuhan PNBPN;
1.5. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Signifikan	1.5.1. Pencapaian Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Pelayanan
1.6. Pengembangan Sistem Informasi BLU	1.6.1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU
1.7. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	1.7.1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
1.8. Utilisasi Aset yang Dikelola BP oleh Batam	1.8.1. Peningkatan Realisasi Utilisasi Aset
1.9. Pengelolaan BP Batam yang akuntabel	1.9.1. Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal
1.10. Transformasi dari FTZ ke KEK	1.10.1. Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 KEK ke Dewan Kawasan

Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam

Adapun target sasaran BP Batam tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan	6.3%	4.72% (TW. III)
2.	Investasi pada kawasan perusahaan	Komitmen nilai investasi	900,000,000 (US\$)	461,044,862 (US\$)
<i>Kurs 1 USD = Rp 14.500</i>				Rp 6.685.150.499.000
3.	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	-
4.	Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang signifikan	Realisasi jumlah PNBPN tahun 2019	Rp 1,273 Triliun	Rp 1,330 Triliun
5.	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	≥ 76,61 (skala 1-100) (Predikat Baik)	80,55 (predikat baik)
6.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	71 %
7.	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	100 %	77.5 %
8.	Utilisasi aset yang dikelola oleh BP Batam	Peningkatan realisasi utilisasi aset	10 %	10%
9.	Pengelolaan BP Batam yang akuntabel	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal	100 %	89.99 %
10.	Transformasi dari <i>Free Trade Zone</i> ke Kawasan Ekonomi Khusus	Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan	100 %	75 %

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis



### **A.5. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dipilih strategi yang tepat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan strategis BP Batam, merupakan pedoman dalam penyusunan sasaran strategi dan program kerja yang direncanakan dan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang akan datang dan diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BP Batam dengan mempertimbangkan potensi sumber daya BP Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Bersamaan dengan hal tersebut, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan BP Batam telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dalam upaya mencapai visi misi BP Batam, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ketiga (2015—2019) yang dirumuskan dalam NAWACITA yang memiliki agenda, yaitu (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warna Negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesiadan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2005—2025).

Strategi yang akan dilaksanakan BP Batam mencakup eksternal dan internal, yaitu;

#### **a. Eksternal**

1. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan kepelabuhanan, industri dan jasa dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan dalam peningkatan pengembangan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap rencana pengembangan dan promosi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

b. Internal

1. Meningkatkan tata kelola sistem pengaduan pelayanan BP Batam;
2. Melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dilingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam antara lain telah dilaksanakannya pemantapan implementasi SAKIP di BP Batam itu sendiri;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja;
4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), manajerial dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan alur visi yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja BP Batam, yaitu;

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BP Batam
Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara	1 Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional	1 Meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global.	1.1 Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Transformasi dari Free Trade Zone ke Kawasan Ekonomi Khusus 1.3 Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang signifikan	1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan 1.2.1 Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan 1.3.1 Realisasi jumlah PNBPN tahun 2019
	2 Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2 Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK).	2.1 Investasi pada kawasan perusahaan 2.2 Pengembangan Sistem Informasi BLU	2.1.1 Realisasi nilai investasi 2.2.1 Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU
	3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	3. Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	3.1 Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel 3.2 Utilisasi aset yang dikelola oleh BP Batam 3.3 Pengelolaan BP Batam yang akuntabel	3.1.1 Opini Laporan Keuangan 3.2.1 Peningkatan realisasi utilisasi aset 3.3.1 Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal
		4. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4.1 Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi 4.2 Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	4.1.1 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 4.2.1 Pencapaian kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik

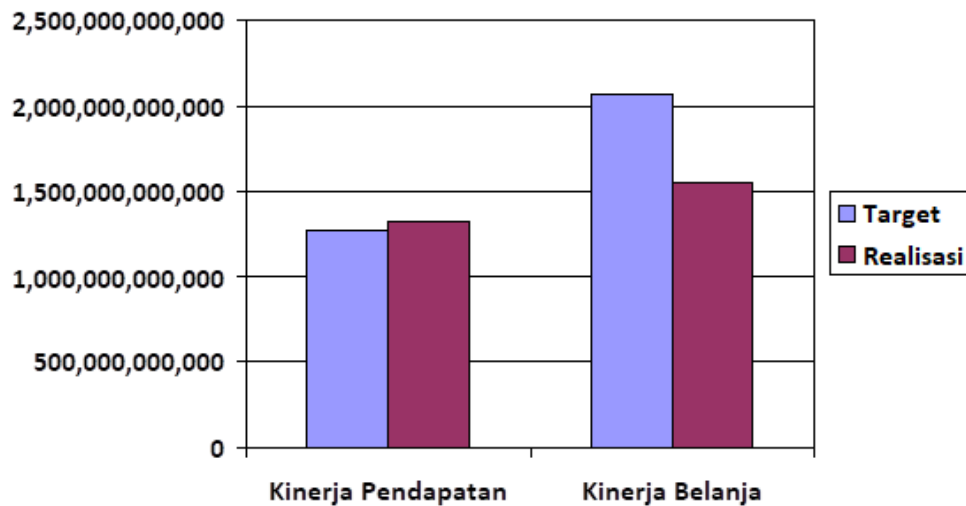
Tabel 2.3. Keterkaitan Visi – Misi – Realisasi BP Batam

## A.6. Program

Kawasan Batam saat ini berkembang sangat pesat, hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan kawasan-kawasan industri, jasa dan perdagangan serta kegiatan lain sehingga Batam menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia

BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas, telah berupaya secara maksimal untuk lebih responsif terhadap berbagai perubahan, peluang dan ancaman yang terjadi, hal ini ditunjukkan dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) untuk tahun 2019 yaitu sebagai alat penyajian terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Kinerja anggaran secara umum yang ditandai dengan ukuran: tingkat pelampauan target anggaran untuk kinerja pendapatan, tingkat efisiensi dan penyerapan anggaran untuk kinerja belanja serta tingkat surplus/defisit dan pembiayaan dapat dikemukakan sebagai berikut;

- Kinerja Pendapatan (realisasi penerimaan PNBPN) selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019) yaitu pada tahun 2017 mencapai Rp974,09 miliar (84,1% dari target) dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.254,46 miliar (82,4% dari target awal, sedangkan apabila dengan target yang direvisi mencapai 103,02%) miliar dan tahun 2019 sebesar Rp1.329,71 miliar, sehingga pada tahun 2019 terdapat surplus Rp187,77 miliar.
- Kinerja Belanja (sumber PNBPN) yang terlihat pada penyerapan anggarannya yaitu tahun 2017 mencapai 78,07% dan tahun 2018 realisasi sebesar 72,96% dari target awal, sedangkan apabila dengan target yang direvisi mencapai 83,46%) dan tahun 2019 mencapai 75,3%.
- Saldo Awal BLU yang dicantumkan sesuai Laporan Keuangan SAP dan Surat Pengesahan Penetapan Belanja BP Batam, maka saldo awal tahun 2019 adalah sebesar Rp586 miliar.



Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran 2019

### A.7. Rencana Kinerja

Penjabaran dari Renstra BP Batam Tahun 2015—2019 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam). Rencana kinerja BP Batam Tahun 2019 ditetapkan program, kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

#### Kegiatan pokok (Misi 1)

##### Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional

- a. Pertumbuhan Ekonomi.  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  1. Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan
- b. Transformasi dari Free Trade Zone ke Kawasan Ekonomi Khusus.  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  1. Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan
- c. Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang signifikan  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  1. Realisasi jumlah PNBK tahun 2019

### **Kegiatan pokok (Misi 2)**

**Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

- a. Investasi pada kawasan perusahaan  
Dengan Indikator kinerja sasaran;
  - 1. Realisasi nilai investasi
- b. Pengembangan Sistem Informasi BLU.  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  - 1. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

### **Kegiatan pokok (Misi 3)**

**Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan**

- a. Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel.  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  - 1. Opini Laporan Keuangan
- b. Utilisasi aset yang dikelola oleh BP Batam  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  - 1. Peningkatan realisasi utilisasi asset
- c. Pengelolaan BP Batam yang akuntabel  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  - 1. Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal
- d. Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  - 1. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
- e. Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi  
Dengan indikator kinerja sasaran;
  - 1. Pencapaian kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan publik,

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat hubungan antara IKU dan Unit Kerja yang bertanggung jawab;

PROGRAM/KEGIATAN	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU		No. IKU
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam</b>				
Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan	Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan	Peningkatan realisasi utilisasi aset	1, 8
Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan	Realisasi jumlah PNBPN tahun 2019		4
Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/ Jasa	Biro Umum dan Sekretariat	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal		9
Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	Biro Sumber Daya Manusia	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	5, 7
Pengelolaan Administrasi Keuangan	Biro Keuangan	Opini Laporan Keuangan		3
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan	Realisasi jumlah PNBPN tahun 2019	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	4, 6
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan	Peningkatan realisasi utilisasi aset	Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan	8, 10
Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	Biro Pengembangan Manajemen Kinerja	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	5, 7
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	Biro Perencanaan Teknik	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal	7, 9
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Satuan Pemeriksa Internal	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal	6, 9
Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum dan Organisasi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK		7
<b>Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam</b>				
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Kantor Pengelolan Lahan	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Kantor Pelabuhan Laut Batam	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5

PROGRAM/KEGIATAN	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU		No. IKU
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Centre dan Sistem Informasi	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	2, 6
Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam	Direktorat Lalu Lintas Barang	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB- Batam	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	2, 5
Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	Direktorat Pemanfaatan Aset	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Peningkatan realisasi utilisasi aset	2, 8
Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	Direktorat Pengamanan	Realisasi nilai investasi tahun 2019	Peningkatan realisasi utilisasi aset	2, 8

Tabel 2.4. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU

## B. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja BP Batam adalah sebagai berikut;

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan	6.3%	4.72% (TW. III)	74.92 %
2.	Investasi pada kawasan perusahaan	Realisasi nilai investasi	900,000,000,- (US\$)	461,044,862 (US\$)	51.2 %
<i>Kurs 1 USD = Rp 14.500</i>				Rp 6,685,150,499,000	
3.	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-
4.	Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang signifikan	Realisasi jumlah PNPB tahun 2019	Rp1,273 Triliun	Rp.1,330 Triliun	104.5 %
5.	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	≥ 76,61 (skala 1-100) (Predikat Baik)	80.55 (predikat baik)	100 %
6.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	71 %	71 %
7.	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	100 %	77.5 %	77.5 %
8.	Utilisasi aset yang dikelola oleh BP Batam	Peningkatan realisasi utilisasi aset	10 %	10 %	100 %
9.	Pengelolaan BP Batam yang akuntabel	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal	100 %	89.99 %	89.99 %
10.	Transformasi dari <i>Free Trade Zone</i> ke Kawasan Ekonomi Khusus	Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan	100 %	75 %	75 %

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Pengukuran Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator-indikator tertentu (*outputs* atau *outcomes*) yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra BP Batam 2015-2019. Indikator *inputs* adalah semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran, yaitu berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. Indikator *outputs* adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung, baik berupa fisik maupun nonfisik. Indikator *outcomes* adalah suatu gambaran dari hasil nyata suatu kegiatan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh lingkungan di sekitarnya.

#### B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

##### 1. Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Batam dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2019 telah menetapkan 10 Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, dan secara detail capaian kinerja sasaran diuraikan berikut ini.

Sasaran *Pertama* Pertumbuhan Ekonomi di Batam. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan	6.3%	4.72 %	74.92 %

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Ke-1

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan mencapai 4.72 % sampai dengan triwulan III di 2019 dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 6.3 % jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Batam Triwulan III pada tahun 2018 sebesar 3.74% dan dibandingkan dengan capaian realisasi pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2019 (*y-On-y*) Triwulan III tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0.98% yang menjadi sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi Batam merupakan Sektor Makanan dan Minuman 15,06% dan sektor konstruksi 14,44% . Indikator Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan mencapai realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 74,92 %. BP Batam telah mengupayakan pertumbuhan ekonomi Batam, salah satunya adalah dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta peningkatan pelayanan dalam perizinan investasi serta perizinan lalu lintas barang.

Sasaran *Kedua*, mewujudkan Investasi PMA pada Kawasan Pengusahaan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, yaitu menetapkan komitmen nilai investasi dengan target US\$ 900,000,000.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Investasi PMA pada Kawasan Pengusahaan	Komitmen Nilai Investasi	900,000,000 US\$	461,044,862 US\$ Rp 6,685,150,499,000	51.2 %

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Investasi PMA pada Kawasan Pengusahaan merupakan sasaran kedua dalam sasaran strategis yang ingin dicapai dengan target US\$ 900,000,000. Pencapaian investasi PMA pada Kawasan pengusahaan terealisasi sebesar US\$ 461,044,862 dengan Kurs 1 USD = Rp 14.500 setara Rp 6,685,150,499,000 atau 51.2 % dari target untuk tahun 2019. Data yang diolah merupakan data realisasi investasi, data sampai Semester 2, dalam OSS hanya mata uang rupiah dan belum bisa dipisahkan data komitmen dan realisasi investasi. Lamanya proses investasi terkait dengan regulasi menyebabkan investasi menjadi terhambat.

Perbaikan untuk investasi PMA diantaranya adalah adanya jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam dan hal yang terkait dengan waktu pelayanan perizinan investasi.

Sasaran *Ketiga* lebih ditekankan pada penyusunan laporan keuangan. Indikator yang dimasukkan adalah Opini Laporan.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran ke-3

Sasaran strategis Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel dengan indikator kinerjanya Opini Laporan Keuangan BP Batam untuk memperoleh predikat WTP pada laporan keuangan masih menunggu hasil evaluasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mana hasil evaluasi ini akan di umumkan di bulan Maret. Merujuk capaian Opini Laporan Keuangan BP Batam selalu mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun 2016 s/d 2018.

Sasaran *Keempat*, Pertumbuhan Pendapatan Layanan secara Signifikan Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Pertumbuhan PNBPNP.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Pertumbuhan Pendapatan Layanan secara Signifikan	Tingkat Pertumbuhan PNBPNP	Rp 1,273 Triliun	Rp 1,330 Triliun	104.5 %

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4

Indikator tingkat pertumbuhan PNBPNP yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar Rp 1,273 Triliun. Tingkat pertumbuhan PNBPNP Batam secara Keseluruhan mencapai realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 104.5 % atau sebesar Rp 1,330 Triliun dari target tahun 2019.

Sasaran *Kelima*, Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Signifikan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Pencapaian Kepuasan *Stakeholder* terhadap Pelayanan Publik.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Signifikan	Pencapaian Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Pelayanan Publik	≥ 76.61 (Skala 1 – 100) Atau predikat baik.	80.55 (predikat baik)	100 %

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran Ke-5

Pencapaian Kepuasan *Stakeholder* terhadap Pelayanan Publik BP Batam mendapatkan 80.55 (predikat baik) dari target  $\geq 76.61$ . Pedoman untuk perhitungan skala kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik adalah Permenpan RB 14/2017. Kepuasan *stakeholder* merupakan hasil dari pelayanan. Walaupun telah memenuhi 100 % realisasi, BP Batam akan terus meningkatkan pelayanan publik yang maksimal kepada *stakeholder*.

Sasaran *Keenam*, Pengembangan Sistem Informasi BLU. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100 %	71 %	71 %

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Sasaran Ke-6

Indikator tingkat Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU telah direalisasikan sebesar 71 % sesuai dengan target tahun 2019 dalam realisasinya BP Batam belum memenuhi target sebesar 100% hal ini menjadi evaluasi dan dorongan untuk BP Batam kedepannya untuk mendorong perbaikan dalam pengembangan sistem informasi BLU. Modernisasi dan simplifikasi di BP Batam akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang mudah dan cepat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Sasaran *Ketujuh*, Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	100 %	77.5 %	77.5 %

Tabel 3.7. Indikator Kinerja Sasaran Ke-7

Berdasarkan hasil evaluasi internal BP Batam, Pembangunan Zona integritas menuju WBK di BP Batam terus dilakukan selama tahun 2019 dan 77.5 % dari target 100 % Pembangunan Zona Integritas di seluruh daerah yang dikelola oleh BP Batam telah direalisasikan. Pada tahun 2019 telah ditandatangani pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tetapi terkait dengan adanya perubahan SOTK, sehingga pada tahun 2019 unit kerja berpredikat WBK tertunda dan akan terus dilakukan perbaikan untuk ditahun mendatang.

Sasaran *Kedelapan*, Utilisasi Aset yang dikelola oleh BP Batam. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Peningkatan Realisasi Utilisasi Aset.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Utilisasi Aset yang Dikelola oleh BP Batam	Peningkatan Realisasi Utilisasi Aset	10 %	10 %	100 %

Tabel 3.8. Indikator Kinerja Sasaran Ke-8

BP Batam telah menyelesaikan Peningkatan Realisasi Utilisasi Aset sebesar 10 % atau 100% dari Aset yang dikelola BP Batam. Utilisasi aset merupakan ukuran seberapa intensif suatu aset digunakan untuk memenuhi tujuan pemberian pelayanan, sehubungan dengan potensi kapasitas aset.

Sasaran *Kesembilan*, Pengelolaan BP Batam yang Akuntabilitas. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Belanja Modal.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Pengelolaan BP Batam yang Akuntabilitas	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Belanja Modal	100 %	89.99 %	89.99 %

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Sasaran Ke-9

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2019, Indikator tingkat Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Belanja Modal telah direalisasikan sebesar 89.99 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% tidak tercapainya target penyelesaian pekerjaan fisik BP Batam dikarenakan adanya evaluasi serta skala prioritas terhadap pengerjaan fisik yang akan dikerjakan sehingga ada beberapa pekerjaan yang ditunda ke tahun berikutnya 2020.

Sasaran *Kesepuluh*, Transformasi dari FTZ ke KEK. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 KEK ke Dewan Kawasan.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1		2	3	4	5
1	Transformasi dari FTZ ke KEK	Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 KEK ke Dewan Kawasan	100%	75%	75%

Tabel 3.10. Indikator Kinerja Sasaran Ke-10

Tingkat Persentase Penyelesaian pengusulan 4 KEK ke Dewan Kawasan sudah berjalan 75% atau telah terealisasi 3 pengusulan KEK dari target pengusulan ke Dewan Kawasan ditetapkan yaitu sebanyak 4 KEK ke Dewan Kawasan.

## 2. Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tersaji dalam perjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2019, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 82.68 %. Belum maksimalnya pencapaian realisasi kinerja BP Batam di pengaruhi oleh data yang di rilis oleh BPS, data pertumbuhan ekonomi Batam secara keseluruhan baru mencapai triwulan III. Indikator Realisasi investasi pada tahun ini data yang bisa ditampilkan hanya hingga akhir semester I 2019, untuk semester II, penarikan data masih dalam proses penyesuaian dengan penerapan OSS (*Online Single Submission*). Sasaran strategis Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel dengan indikator kinerjanya Opini Laporan Keuangan BP Batam untuk memperoleh predikat WTP pada laporan keuangan belum bisa dilakukan pengukuran karena hasil Audit atas Laporan Keuangan BP Batam TA 2019 belum dilakukan sehingga mempengaruhi persentase realisasi kinerja atas target sasaran strategis. Adapun capaian sasaran strategis untuk indikator kinerja utama pada 2019 dapat terlihat pada tabel berikut;

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Batam secara Keseluruhan	6.3%	4.72% (T.W. III)	74.92 %
2.	Investasi pada kawasan perusahaan	Realisasi nilai investasi	900,000,000 (US\$)	461,044,862 US\$	51.2 %
				Rp 6,685,150,499,000	
<i>Kurs 1 USD = Rp 14.500</i>					
3.	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-
4.	Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang signifikan	Realisasi jumlah PNBPN tahun 2019	Rp1,273 Triliun	Rp1,330 Triliun	104.5 %
5.	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan publik	≥ 76.61 (skala 1-100) (Predikat Baik)	80.55 (predikat baik)	100 %
6.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	71%	71 %
7.	Pengelolaan BP Batam yang Bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	100 %	77.5%	77.5 %
8.	Utilisasi aset yang dikelola	Peningkatan realisasi utilisasi aset	10 %	10%	100 %

	oleh BP Batam				
9.	Pengelolaan BP Batam yang akuntabel	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal	100 %	89.99 %	89.99 %
10.	Transformasi dari <i>Free Trade Zone</i> ke Kawasan Ekonomi Khusus	Persentase Penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK ke Dewan Kawasan	100 %	75%	75 %
<b>Rata-rata</b>					<b>82.68 %</b>

Tabel 3.11 Capaian IKU 2019

### C. Akuntabilitas Keuangan

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN tahun 2018 dan 2019

Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2019 sebesar Rp 1,330 Triliun atau mencapai 104,5 % dari target PNBPN sebesar Rp 1,273 Triliun dengan rincian per unit sebagai berikut;

(Juta Rupiah)

NO	UNIT PENGHASIL	PENERIMAAN		
		TA. 2019		
		TARGET	REALISASI	%
<b>A.</b>	<b>KANTOR PUSAT</b>	<b>61,650.00</b>	<b>74,560.90</b>	<b>120.94</b>
1.	Direktorat Pemanfaatan Aset	22,000	4,802.05	72.96
2.	Direktorat Prasarana & Sarana	5,500	8,426.53	87.31
3.	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	15,000	1,191.27	56.18
4.	Direktorat Lalu Lintas Barang	150	44,090.08	794.18
5.	Biro Keuangan	19,000	16,050.98	232.05
<b>B.</b>	<b>UNIT MANDIRI</b>	<b>1,211,657.50</b>	<b>1,256,024.30</b>	<b>103.66</b>
1.	Direktorat Pengelolaan Lahan	300,000	575,687.78	191.90
2.	BUBU Hang Nadim	278,007	201,893.46	72.62
3.	Kantor Pelabuhan Laut	530,450	359,220.28	67.72
4.	Rumah Sakit BP Batam	60,000	88,625.81	147.71
5.	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	42,000	29,628.60	70.54
6.	Kantor Perwakilan Jakarta	1,200	968.37	80.70
<b>C.</b>	<b>TOTAL PENERIMAAN (A+B)</b>	<b>1,273,307.50</b>	<b>1,330,585.21</b>	<b>104.50</b>

Tabel 3.12. Realisasi PNBPN 2019

Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2018 adalah sebesar



Rp1,254,461,890,000 atau 103,2% dari target PNBPN sebesar Rp 1,217,735,000,000, terdapat peningkatan dalam realisasi penerimaan PNBPN sebesar Rp 75,347,883,301 dengan rincian per unit sebagai berikut;

(dalam juta rupiah)

NO	UNIT PENGHASIL	PENERIMAAN		
		TA. 2018		
		TARGET	REAL (s/d 31 Des 2018)	% REAL
<b>A</b>	<b>KANTOR PUSAT</b>	<b>319,540.00</b>	<b>505,146.15</b>	<b>158.09</b>
1	Direktorat Pengelolaan Lahan	267,000.00	449,434.31	168.33
2	Direktorat Pemanfaatan Aset	20,000.00	16,803.31	84.02
3	Direktorat Prasarana & Sarana	5,000.00	4,875.13	97.50
4	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	10,000.00	7,694.92	76.95
5	Direktorat Lalu Lintas Barang	540.00	487.35	90.25
6	Biro Keuangan	17,000.00	25,851.13	152.07
<b>B</b>	<b>UNIT MANDIRI</b>	<b>898,195.00</b>	<b>749,315.74</b>	<b>83.42</b>
1	BUBU Hang Nadim	252,000.00	247,485.73	98.21
2	Kantor Pelabuhan Laut	505,000.00	401,496.58	79.50
3	Rumah Sakit BP Batam	100,000.00	72,554.49	72.55
4	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	40,195.00	26,776.47	66.62
5	Kantor Perwakilan Jakarta	1,000.00	1,002.47	100.25
<b>C</b>	<b>TOTAL PENERIMAAN (A+B)</b>	<b>1,217,735.00</b>	<b>1,254,461.89</b>	<b>103.02</b>

Tabel 3.13. Realisasi PNBPN 2018  
(Sumber: Laporan Keuangan Audited BP Batam 2018)

Jika dibandingkan dengan realisasi target pada tahun 2018, tahun 2019 mengalami peningkatan persentase realisasi target sebesar 1.41 %. Rincian kenaikan/penurunan realisasi PNBPN 2018–2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

(dalam juta rupiah)

UNIT PENGHASIL	TA. 2018			TA. 2019			% KENAIKAN/PENURUNAN
	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	
Direktorat Pengelolaan Lahan	267,000.00	449,434.31	168.33	300,000.00	575,687.78	191.90	23.57
Direktorat Pemanfaatan Aset	20,000.00	16,803.31	84.02	22,000.00	4,802.05	72.96	-11.06
Direktorat Prasarana & Sarana	5,000.00	4,875.13	97.50	5,500.00	8,426.53	87.31	-10.19
Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	10,000.00	7,694.92	76.95	15,000.00	1,191.27	56.18	-20.77
Direktorat Lalu Lintas Barang	540.00	487.35	90.25	150.00	44,090.08	794.18	703.93
Biro Keuangan	17,000.00	25,851.13	152.07	19,000.00	16,050.98	232.05	79.98
BUBU Hang Nadim	252,000.00	247,485.73	98.21	278,000.00	201,893.46	72.62	-25.59
Kantor Pelabuhan Laut	505,000.00	401,496.58	79.50	530,450.00	359,220.28	67.72	-11.78
Rumah Sakit BP Batam	100,000.00	72,554.49	72.55	60,000.00	88,625.81	147.71	75.16

Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	40,195.00	26,776.47	66.62	42,000.00	29,628.60	70.54	3.92
Kantor Perwakilan Jakarta	1,000.00	1,002.47	100.25	1,200.00	968.37	80.70	-19.55
<b>TOTAL</b>	<b>1,217,735.00</b>	<b>1,254,461.89</b>	<b>103.02</b>	<b>1,273,307.49</b>	<b>1,330,585.21</b>	<b>104.5</b>	<b>1.48</b>

Tabel 3.14. Perbandingan target dan realisasi PNBPN 2018 - 2019

## 2. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2019 dan Target DIPA 2020

Badan Pengusahaan Batam telah menetapkan DIPA untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 2,226,885,004,000 dan terdapat peningkatan jumlah anggaran sebesar Rp 162,690,051,000. Jika di bandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 2,064,194,953,000 dan direalisasikan sebesar Rp 1,552,078,118,039 dengan rincian sebagai berikut;

Kegiatan	TA. 2019				TA. 2020
	Pagu DIPA (Awal)	Pagu DIPA (Revisi)	Realisasi (unaudited)	% thd DIPA Revisi Sep	DIPA
<b>A Belanja RM</b>	<b>340,000,000,000</b>	<b>340,000,000,000</b>	<b>279,845,304,392</b>	<b>82.31</b>	<b>527,000,000,000</b>
Belanja RM	340,000,000,000	340,000,000,000	279,845,304,392		527,000,000,000
<b>B Belanja PHLN</b>	<b>193,621,568,000</b>	<b>193,621,568,000</b>	<b>127,644,826,305</b>	<b>65.92</b>	<b>188,880,000,000</b>
Belanja PHLN	193,621,568,000	193,621,568,000	127,644,826,305		188,880,000,000
<b>C Belanja RMP-PHLN</b>	<b>13,961,896,000</b>	<b>13,961,896,000</b>	<b>2,547,377,211</b>	<b>18.25</b>	<b>35,290,000,000</b>
Belanja RMP-PHLN	13,961,896,000	13,961,896,000	2,547,377,211		35,290,000,000
<b>D Belanja PNBPN</b>	<b>1,273,307,499,000</b>	<b>1,516,611,489,000</b>	<b>1,142,040,610,131</b>	<b>75.30</b>	<b>1,475,715,004,000</b>
5113 Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	10,037,997,000	15,604,378,000	11,448,896,682	73.37	9,177,340,000
5114 Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	98,843,907,000	139,888,485,000	103,135,945,843	73.73	131,200,591,000
5115 Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	634,142,324,000	634,142,324,000	529,851,486,315	83.55	666,159,330,000
5116 Pengelolaan Administrasi Keuangan	6,775,373,000	6,775,373,000	4,673,509,887	68.98	7,188,711,000
5117 Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	11,187,647,000	19,260,669,000	8,017,500,536	41.63	9,272,022,000
5118 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	7,826,987,000	7,826,987,000	5,703,743,596	72.87	8,837,513,000
5119 Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	19,040,626,000	19,040,626,000	14,680,465,685	77.10	15,277,207,000
5120 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	1,842,022,000	1,842,022,000	1,588,119,126	86.22	5,502,864,000
5121 Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	1,496,248,000	1,692,685,000	1,111,150,377	65.64	2,124,307,000
5122 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan kelembagaan	1,861,915,000	1,861,915,000	1,661,509,696	89.24	2,170,262,000
5123 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan Di Kawasan Badan Pengusahaan Batam	17,378,591,000	21,158,774,000	13,474,818,770	63.68	19,766,881,000
5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	49,763,979,000	132,061,400,000	34,347,960,084	26.01	61,681,367,000
5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	129,534,857,000	154,919,898,000	105,864,204,205	68.33	144,845,986,000
5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	117,646,785,000	155,409,038,000	140,728,233,843	90.55	141,088,526,000
5127 Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	17,428,180,000	30,224,034,000	24,134,191,690	79.85	50,656,009,000
5128 Pengelolaan Data Centre dan Sistem Informasi	42,386,016,000	48,602,777,000	42,279,196,182	86.99	48,550,733,000
5129 Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam	2,310,409,000	2,310,409,000	1,935,089,359	83.76	2,993,172,000
5130 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	14,452,476,000	26,778,869,000	20,376,058,570	76.09	35,887,426,000
5131 Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	16,623,742,000	20,759,339,000	11,789,654,003	56.79	23,344,357,000
5132 Pelayanan Perijinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	7,788,780,000	8,184,901,000	7,158,152,198	87.46	9,170,965,000
5133 Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	25,608,395,000	28,936,343,000	26,577,941,062	91.85	32,538,968,000
5134 Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	39,330,243,000	39,330,243,000	31,502,782,422	80.10	48,280,467,000
<b>TOTAL</b>	<b>1,820,890,963,000</b>	<b>2,064,194,953,000</b>	<b>1,552,078,118,039</b>	<b>75.19</b>	<b>2,226,885,004,000</b>

Tabel 3.15. Perbandingan DIPA 2019 dan 2020

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengusahaan Batam terhadap capaian kinerja selama tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, Badan Pengusahaan menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Melihat hasil yang dicapai pada tahun kerja 2019 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengusahaan Batam telah berupaya secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang ditetapkan, masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan, namun kinerja keuangan secara umum melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tersaji dalam perjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2019, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 82.68 %. Indikator Realisasi investasi pada tahun ini data yang bisa ditampilkan hanya hingga akhir semester I 2019, untuk semester II, penarikan data masih dalam proses penyesuaian dengan penerapan OSS (*Online Single Submission*). Sasaran strategis Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel dengan indikator kinerjanya Opini Laporan Keuangan BP Batam untuk memperoleh predikat WTP pada laporan keuangan belum bisa dilakukan pengukuran karena hasil Audit atas Laporan Keuangan BP Batam TA 2019 belum dilakukan sehingga mempengaruhi persentase realisasi kinerja atas target sasaran strategis.

#### **B. Saran**

Langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam untuk tahun berikutnya meliputi:

1. Perlunya tata kelola SDM guna menunjang tugas dan fungsi tiap unit kerja di BP Batam;

2. Perlunya regulasi yang mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan stakeholder lainnya agar dapat bersinergi membangun ekonomi Batam;
3. Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2019 yang telah disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



**BADAN PENGUSAHAAN BATAM**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019**

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM**